

Rencana Aksi OGI Non Inpres 2012

DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Menguatkan Kelembagaan Pengelolaan Informasi seluruh BUMD	Beroperasinya PPID di BUMD, serta tersedianya Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di seluruh BUMD	Laporan pemetaan BUMD telah memiliki PPID dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)	50% BUMD telah memiliki PPID dan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)
		Tertaksananya mekanisme atau SOP permintaan informasi dan penanganannya yang murah, cepat dan mudah melalui meja informasi dan website BUMD	Laporan pemetaan BUMD telah melayani permintaan informasi oleh publik sesuai SOP internal yang berlaku melalui meja informasi dan website BUMD	50% BUMD telah melayani permintaan informasi oleh publik sesuai SOP internal yang berlaku melalui meja informasi dan website BUMD
		Terpublikasikannya laporan kinerja layanan informasi publik sesuai peraturan perundangan secara berkala	Laporan pemetaan BUMD telah mempublikasikan laporan kinerja layanan informasi publik	50% BUMD telah mempublikasikan laporan kinerja layanan informasi publik
2.	Mendorong dibukanya informasi Rencana Kegiatan APBD	Publikasi ringkasan RKA-SKPD di papan pengumuman kecamatan, dan media lokal lainnya yang mudah diakses	50 kabupaten Kota telah mempublikasikan ringkasan RKA-SKPD Kecamatan berupa poster di papan pengumuman kecamatan,	100 kabupaten Kota telah mempublikasikan ringkasan RKA-SKPD Kecamatan berupa poster di papan pengumuman kecamatan,
3.	Membangun Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Open Government	Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk memonitor sekolah mempublikasi alokasi dan realisasi dana BOS di papan pengumuman sekolah	Tersusunnya strategi dan rencana kerja dalam rangka publikasi alokasi dan realisasi dana BOS di papan pengumuman sekolah	20% Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan monitoring sekolah yang mempublikasi alokasi dan realisasi dana BOS di papan pengumuman sekolah
4.	Pengembangan Sistem Pemantauan Berbasis Masyarakat (Community Based Monitoring System - CBMS) untuk Pembangunan Manusia di daerah	Tersosialisasikannya CBMS – sebagai sistem pemantauan alternatif secara kuantitatif dan kualitatif di tingkat desa,	Tersusunnya strategi dan rencana kerja sosialisasi CBMS	250 Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi CBMS – sebagai sistem pemantauan alternatif secara kuantitatif dan kualitatif di tingkat desa,
		Pelaksanaan uji coba CBMS di tingkat desa di Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi dan rencana kerja termasuk penetapan 50 kabupaten/kota sebagai uji coba CBMS tingkat desa	Terselenggaranya uji coba CBMS di tingkat desa di 50 kabupaten/kota
		Terlembaganya CBMS di proses perencanaan, penganggaran program penanggulangan kemiskinan, serta pemantauan dan evaluasi kinerjanya dalam struktur pemerintahan daerah	Tersusunnya draft awal ketentuan implementasi CBMS.	Diberlakukannya pengaturan menyangkut implementasi CBMS dalam proses perencanaan, penganggaran program penanggulangan kemiskinan, serta pemantauan dan evaluasi kinerjanya dalam struktur pemerintahan daerah di 250 Kabupaten/kota

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Butan Juni 2012	Butan Desember 2012
1.	Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penanganan program-program pengentasan kemiskinan	Tersedianya data dan informasi desa, mencakup rencana kegiatan/program, anggaran dan pelaksanaan, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan K/L maupun pemda Prov/Kab/Kota melalui website TNP2K.	Tertindakannya kesepakatan kerjasama pertukaran data dengan instansi terkait	Dipublikasinya seluruh data dan informasi desa, mencakup rencana kegiatan/program, anggaran dan pelaksanaan, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan K/L maupun pemda Prov/Kab/Kota dalam website TNP2K
		Dibertakukannya PP/Inpres yang mengatur penggunaan data rumah tangga/individu bagi program penanggulangan kemiskinan.	Tersusunnya draft awal rumusan PP/Inpres	Dibertakukannya PP/Inpres
		Terpublikasikannya gambaran kondisi sosial-ekonomi tingkat desa dalam website TNP2K sehingga dapat diakses Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/kota serta masyarakat.	Tersusunnya disain website menyangkut informasi gambaran sosial-ekonomi tingkat desa	Telah dipublikasikannya informasi gambaran sosial-ekonomi untuk tingkat desa dalam website TNP2K
		Implementasi Pemantauan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberlakuan Sistem Pemantauan dan Evaluasi	Tersusunnya laporan implementasi Program Harapan Hidup semester I tahun 2012.	Telah tersusunnya Laporan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) termasuk informasi efektivitas Sistem Pemantauan dan Evaluasi yang diberlakukan.
		Tersedianya ketentuan internal/SOP yang mengatur mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan	Tersusunnya draft awal ketentuan internal/SOP	Dibertakukannya ketentuan internal/SOP
		Pemetaan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan provinsi, kab/kota dan desa di seluruh Indonesia menyangkut program penanggulangan kemiskinan.	Tersusunnya rencana kerja pemetaan mekanisme penanganan pengaduan.	Tersusunnya laporan pemetaan mekanisme penanganan pengaduan.

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pelayanan transportasi kereta api	Transparansi dokumen RKA-KL, DIPA, Standar Pelayanan Minimal, pemanfaatan PSO, IMO, dan TAC, dan laporan triwulan melalui website Ditjen Perkeretaapian	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi dokumen RKA-KL, DIPA, Standar Pelayanan Minimal, pemanfaatan PSO, IMO, dan TAC, dan laporan triwulan dalam website Ditjen Perkeretaapian	Terpublikasikannya dokumen RKA-KL, DIPA, Standar Pelayanan Minimal, pemanfaatan PSO, IMO, dan TAC, dan laporan triwulan dalam website Ditjen Perkeretaapian
		Transparansi dokumen hasil audit akuntan publik secara berkala melalui media massa lokal dan nasional	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi hasil audit akuntan publik secara berkala melalui media massa lokal dan nasional	Terpublikasikannya hasil audit akuntan publik secara berkala melalui media massa lokal dan nasional
2.	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas pelayanan angkutan darat	Transparansi perizinan trayek angkutan antar provinsi pada website Kementerian	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi Informasi Layanan Angkutan Antar Provinsi menyangkut : mekanisme pengajuan ijin trayek, biaya pengurusan ijin, lama waktu dibutuhkan, daftar ijin trayek angkutan serta trayek yang terbuka untuk pengajuan izin trayek pada website Kementerian	Dipublikasinya Informasi Layanan Angkutan Angkutan Antar Provinsi menyangkut : mekanisme pengajuan ijin trayek, biaya pengurusan ijin, lama waktu dibutuhkan, daftar ijin trayek angkutan serta trayek yang terbuka untuk pengajuan izin trayek pada website Kementerian

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEJAKSAAN AGUNG**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Transparansi Layanan Publik Kantor Kejaksaan	Terlaksananya pilot project publikasi layanan informasi publik di kantor Kejaksaan, Kejati, dan kejar dalam website meliputi : a. Profil organisasi & SDM b. Jenis layanan publik berikut mekanisme kerja, biaya dan waktu dibutuhkan c. Informasi keluhan dan tindak lanjutnya	Publikasi informasi Kejaksaan Agung, tersedianya kanal pelayanan informasi publik pada website Kejaksaan yang berisi a. Jenis layanan publik berikut mekanisme kerja, biaya dan waktu dibutuhkan; b. Informasi keluhan dan tindak lanjutnya, c. Daftar informasi publik	Terlaksananya publikasi informasi Kejaksaan Agung dan tersedianya kanal pelayanan informasi publik pada website Kejaksaan yang berisi : a. Jenis layanan publik berikut mekanisme kerja, biaya dan waktu dibutuhkan; b. Informasi keluhan dan tindak lanjutnya, Daftar informasi publik pada 5 Kejati dan 10 Kejari
2.	Terlaksananya Peraturan dan Instruksi Jaksa Agung yang mendorong implementasi Open Government dan keterbukaan informasi	Terlaksananya Peraturan Jaksa Agung 032/2010 dan Instruksi Jaksa Agung 001/2011, melalui publikasi informasi yang wajib disediakan secara berkala pada website kejaksaan setiap 3 bulan sekali	Terlaksananya Peraturan Jaksa Agung 032/2010 dan Instruksi Jaksa Agung 001/2011, dengan terpublikasikannya informasi yang wajib disediakan secara berkala pada website kejaksaan setiap 3 bulan sekali	Publikasi informasi yang wajib disediakan secara berkala pada website kejaksaan setiap 3 bulan sekali
		Penyempurnaan publikasi informasi status perkara (SIMKARI) yang lebih rinci status berikut dokumen melalui website	Terpublikasinya informasi status perkara tindak pidana korupsi, secara rinci dalam website Kejaksaan & 20 dakwaan untuk kasus2 yang menarik perhatian	Publikasi informasi status perkara tindak pidana korupsi, secara rinci dalam website Kejaksaan & 50 dakwaan untuk kasus-kasus yang menarik perhatian
		Publikasi rincian data aset milik negara yang berhasil dirampas Kejaksaan dan dikembalikan negara secara periodik (bulanan)	Terpublikasinya rincian data aset milik negara yang berhasil dirampas Kejaksaan dan dikembalikan negara secara periodik (bulanan)	Publikasi rincian data aset milik negara yang berhasil dirampas Kejaksaan dan dikembalikan negara secara bulanan

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong transparansi informasi dan layanan perizinan	Terpublikasinya informasi dan layanan online perizinan untuk Farmasi, Alkes dan PKRT mencakup prosedur/mechanisme, lama waktu dibutuhkan dan biaya layanan yang dikenakan pada website Kementerian Kesehatan	Tersusunnya rencana kerja layanan online perizinan untuk Farmasi, Alkes dan PKRT website Kementerian Kesehatan	Informasi dan layanan online perizinan untuk farmasi, Alkes dan PKRT meliputi prosedur/mechanisme, lama waktu dibutuhkan dan biaya layanan telah dipublikasikan dalam website Kementerian Kesehatan
		Beroperasinya jendela info dimana publik dapat mengetahui status perizinan untuk Farmasi, Alkes dan PKRT di website Kementerian Kesehatan	Tersusunnya disain status layanan perizinan secara online di website Kementerian Kesehatan	Jendela info mengenai layanan perizinan yang telah selesai secara online di website Kementerian Kesehatan
2.	Mendorong Transparansi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Transparansi data alokasi dan realisasi BOK di : 1. Kab/Kota dalam website Kementerian Kesehatan 2. Puskesmas dalam website Kementerian Kesehatan dan website Dinkes Kab/Kota di 26 Kab/Kota uji coba.	Tersusunnya disain rencana publikasi data alokasi dan realisasi BOK di: 1. Kab/Kota dalam website Kementerian Kesehatan 2. Puskesmas di 26 Kab/Kota uji coba dalam website Kementerian Kesehatan dan website Dinkes Kab/Kota	Data alokasi dan realisasi BOK di : 1. Kab/Kota telah dipublikasikan dalam website Kementerian Kesehatan 2. Puskesmas pada 26 Kab/Kota uji coba telah dipublikasikan dalam website Kementerian Kesehatan dan website Dinkes Kab/Kota
3.	Mendorong Transparansi Pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar untuk Kab/Kota	Transparansi data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar untuk Kab/Kota dalam website Kementerian Kesehatan	Tersusunnya disain rencana publikasi data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar untuk Kab/Kota dalam website Kementerian Kesehatan	Data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar untuk Kab/Kota telah dipublikasikan dalam website Kementerian Kesehatan
4.	Mendorong Transparansi Pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan rujukan di RS dan fasilitas kesehatan lainnya	Transparansi data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan rujukan di RS dan fasilitas kesehatan lainnya dalam website Kementerian Kesehatan	Tersusunnya disain rencana publikasi data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan rujukan di RS dan fasilitas kesehatan lainnya dalam website Kementerian Kesehatan	Data alokasi dan realisasi Program Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan rujukan di RS dan fasilitas kesehatan lainnya telah dipublikasikan dalam website Kementerian Kesehatan

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Terciptanya masyarakat aktif melalui Ombudsman	Prosentase respon (langkah konkrit penyelesaian kasus) pihak Telapor dalam kegiatan tahap Klarifikasi dalam rangka tindak lanjut keluhan pelapor	Tersusunnya strategi dan rencana kerja mendorong pihak telapor memberikan respon dalam rangka penyelesaian kasus pada tahap Klarifikasi	80% pihak telapor memberikan respon dalam rangka penyelesaian kasus pada tahap Klarifikasi
		Pemenuhan publikasi informasi sesuai UU KIP oleh Ombudsman RI baik melalui website maupun media lainnya.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi informasi Ombudsman RI dalam baik dalam website maupun Kantor Ombudsman Pusat dan Perwakilan di Daerah telah sesuai dengan UU KIP	Publikasi informasi Ombudsman RI dalam baik dalam website maupun Kantor Ombudsman Pusat dan Perwakilan di Daerah telah sesuai dengan UU KIP

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
MAHKAMAH AGUNG**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Transparansi Layanan sengketa hukum di Pengadilan	Kinerja Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin (termasuk pos bantuan hukum, prodeo & pelaksanaan sidang keliling).	Tersusunnya strategi dan rencana kerja dalam rangka mendorong Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Jumlah Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin : Pengadilan Umum = 39 Pengadilan Agama = 23
2.	Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi	Diterbitkannya ketentuan Mahkamah Agung yang mewajibkan seluruh badan publik di Indonesia mematuhi putusan Komisi Informasi sekaligus pengaturan sanksi apabila tidak mematuhi	Tersusunnya draft ketentuan MA mewajibkan seluruh badan publik di Indonesia mematuhi putusan Komisi Informasi sekaligus pengaturan sanksi apabila tidak mematuhi	Telah diterbitkannya ketentuan MA mewajibkan seluruh badan publik di Indonesia mematuhi putusan Komisi Informasi sekaligus pengaturan sanksi apabila tidak mematuhi
3.	Mendorong Transparansi Layanan sengketa hukum di Pengadilan	Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang telah memiliki information desk sesuai SK.KMA 1-144 tahun 2012.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja dalam rangka mendorong pengadilan umum dan pengadilan agama memiliki information desk	Jumlah kantor pengadilan yang sudah memiliki information desk : Pengadilan Umum = 75 % Pengadilan Agama = 75 %
		Ditetapkan sebagai pengadilan percontohan (ideal) baik untuk Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama	Tersusunnya strategi dan rencana kerja dalam rangka penetapan pengadilan percontohan.	Kantor pengadilan yang ditetapkan sebagai pengadilan percontohan : Pengadilan Umum = 10 Pengadilan Agama = 10

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong partisipasi publik, dalam pengelolaan lingkungan hidup, SDA dan tata ruang	Publikasi laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penataan lingkungan hidup bagi penanggung-jawab/pelaku usaha/pemegang izin secara berkala	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala	Terpublikasikannya laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala
		Partisipasi publik dalam menyusun kebijakan seperti ijin lingkungan dan AMDAL, kehutanan, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta tata ruang	Tersedianya draft ketentuan mekanisme partisipasi publik dalam menyusun kebijakan seperti ijin lingkungan dan AMDAL, kehutanan, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta tata ruang	Diterbitkannya ketentuan yang mengatur mekanisme partisipasi publik dalam menyusun kebijakan seperti ijin lingkungan dan AMDAL, kehutanan, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, serta tata ruang

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan tata ruang	Berjalannya peran forum multi-stakeholder dalam penyusunan RTRW	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan forum multi-stakeholder dalam penyusunan RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terlaksananya forum multi-stakeholder dalam penyusunan RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Publikasikan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Terpublikasikannya dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW)
		Publikasi data izin wilayah tangkap dan penerimaan dari sektor perikanan	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi data izin wilayah tangkap dan penerimaan dari sektor perikanan	Terpublikasikannya data izin wilayah tangkap dan penerimaan dari sektor perikanan
		Implementasi mekanisme pengaduan di bidang SDA dan Tata Ruang	Tersusunnya draft awal mekanisme pengaduan di bidang SDA dan Tata Ruang	Tersedianya dan terimplementasikannya mekanisme pengaduan di bidang SDA dan Tata Ruang

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kepolisian RI	Berjalannya mekanisme/SOP internal POLRI yang mengatur layanan permintaan informasi (termasuk keluhan) oleh publik melalui website Kepolisian dan media lainnya yang mudah dipahami dan cepat	a. Tersusunnya draft awal ketentuan Polri menyangkut layanan permintaan informasi oleh publik b. Tersusunnya disain publikasi mekanisme layanan permintaan informasi (termasuk penanganan keluhan) dalam website kepolisian	a. Diterbitkannya ketentuan Polri tentang pemberian layanan permintaan informasi oleh publik b. Publikasi mekanisme layanan permintaan informasi (termasuk penanganan keluhan) dalam website kepolisian
		Jumlah pertemuan antara PPID unit kerja Polri (Mabes, Polda, dan Polres) dengan kelompok masyarakat sipil membahas topik keterbukaan informasi (UU KIP) di Kepolisian	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pertemuan dengan kelompok masyarakat sipil di Mabes, Polda dan Polres	Pelaksanaan pertemuan Mabes/Polda/Polres dengan kelompok masyarakat sipil oleh : a. Mabes Polri : 1 pertemuan b. 20 Polda : 1 pertemuan c. 30 Polres : 1 pertemuan
		Jumlah pegawai Humas Polri dan PPID yang diikutsertakan dalam pelatihan menyangkut penguatan aspek teknologi informasi tepat guna.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pelatihan pegawai Mabes, Polda dan Polres	Jumlah pegawai Mabes/Polda/Polres diikutsertakan dalam pelatihan : a. Mabes Polri : 5 pegawai b. 10 Polda : 1 pegawai c. 30 Polres : 1 pegawai
2.	Mendorong peningkatan kualitas layanan informasi secara spasial	Publikasi informasi kriminal secara spasial melalui website Kepolisian dengan pilot project di 6 kota besar yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja publikasi informasi kriminal secara spasial dalam website di 6 kota besar	Terpublikasinya informasi kriminal secara spasial melalui website Kepolisian di 6 kota besar yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makasar.

DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Akselerasi Kegiatan Publikasi Informasi Menyangkut Keterbukaan Informasi	Jumlah tayang/siar program informasi mengenai ketentuan dan Implementasi UU KIP di TV dan radio (nasional)	Tertayangnya program informasi : TV Nasional : 10 kali Radio Nasional : 20 kali	Tertayangnya program informasi : TV Nasional : 50 kali Radio Nasional : 100 kali
2.	Penyediaan jaringan/akses informasi dan komunikasi publik	Pembangunan jaringan kerja antara pemerintah dengan komunitas non pemerintah dalam penyebarluasan informasi kepada publik;	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pemetaan jaringan kerja	Tersusunnya Laporan Pemetaan Jaringan Kerja pemerintah dan komunitas jurnalis, media, dan forum swasta/BUMN dalam rangka penyebarluasan informasi kepada publik;
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi	Jumlah fasilitasi penyebaran informasi publik melalui kerjasama Bakohumas, lembaga pemerintah dan dunia usaha.	Terlaksananya 2 pertemuan Bakohumas/pertemuan lain melibatkan Pemerintah, pengusaha, LSM, dan Akademisi dengan materi Keterbukaan Informasi.	Terlaksananya 10 pertemuan Bakohumas/pertemuan lain melibatkan Pemerintah, pengusaha, LSM, dan Akademisi dengan materi Keterbukaan Informasi.
		Implementasi pilot project desa informasi/sistem informasi desa	Tersusunnya strategi dan rencana kerja implementasi pilot project desa informasi/ sistem informasi desa	Implementasi pilot project desa informasi/sistem informasi desa di 5 kab/kota;
		Tersedianya hasil pemetaan KIM dan jumlah pendirian dan penguatan KIM secara nasional	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pemetaan KIM	a. Tersusunnya Laporan hasil pemetaan b. Pendirian & penguatan 120 KIM
		Evaluasi implementasi program PLIK dan M-PLIK secara nasional termasuk rekomendasi penyempumaannya	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pemetaan program PLIK dan M-PLIK	Tersusunnya laporan pemetaan dan implementasi program PLIK dan M-PLIK secara nasional
4.	Peningkatan Penetrasi Publik dalam mendukung Implementasi Open Government	Penyusunan modul pelaksanaan program PLIK dan mendorong edukasi bagi masyarakat	Tersusunnya strategi dan rencana kerja penyusunan modul baru	Tersusunnya 20 modul baru untuk mendukung pelaksanaan program PLIK
5.	Menguatkan Kelembagaan Pengelolaan Informasi seluruh Badan Publik Pemerintah di Pusat dan Daerah	Terbentuknya PPID badan publik, tersusun Daftar Informasi Publik serta tersedianya informasi publik sesuai perundangan berlaku termasuk layanan pengaduan	Tersusunnya strategi dan rencana kerja percepatan pendirian PPID di Pusat dan Daerah	Jumlah badan publik pemerintah yang telah memiliki PPID : - Badan Publik K/L (100%) - Badan Publik Provinsi (75%) - Badan Publik Kab/kota (30%)
		Penyusunan infrastruktur ketentuan/pedoman untuk percepatan operasional PPID.	Tersusunnya draft pedoman pelaksanaan layanan oleh PPID (termasuk daftar informasi dikecualikan)	Tersusunnya pedoman pelaksanaan layanan oleh PPID (termasuk penyusunan daftar informasi dikecualikan)

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KOMISI INFORMASI PUSAT**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Transparansi Badan Publik melalui pemanfaatan teknologi	Beroperasinya website seluruh Badan Publik yang mempublikasikan informasi publik sesuai standar dan peraturan dalam UU KIP	Tersusunnya strategi dan rencana kerja menyangkut pemetaan website dan asistensi 50 badan publik pemerintah	a. Laporan pemetaan pemenuhan website badan publik baik Pusat dan Daerah terhadap UU KIP b. Laporan asistensi 50 badan publik pemerintah menyangkut penyempurnaan website dalam rangka pemenuhan UU KIP
2.	Mendorong pendirian dan penguatan kelembagaan Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Informasi Daerah	Terbentuknya KID di provinsi	Total jumlah KID yang terbentuk hingg akhir 2012 sebanyak 14 KID	Total jumlah KID yang terbentuk hingg akhir 2012 sebanyak 19 KID
		Implementasi pedoman seleksi Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh anggota komisi informasi daerah yang berkapasitas dan berintegritas;	Tersusunnya draft pedoman seleksi Komisi Informasi Pusat.	Diberlakukannya revisi pedoman seleksi Komisi Informasi Pusat.
		Terlaksananya kerja sama KIP - KID – masyarakat secara berkesinambungan	Tersusunnya draft ketentuan prosedur kerja sama KIP - KID – masyarakat	Tersusunnya ketentuan yang mengatur prosedur kerja sama KIP - KID – masyarakat
		Ketersediaan Roadmap Keterbukaan Informasi di Indonesia	Tersusunnya draft awal Roadmap Keterbukaan Informasi di Indonesia	Tersusunnya Roadmap Keterbukaan Informasi di Indonesia

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
BAPPENAS**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Melembagakan pelaksanaan mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran	Pengaturan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dan anggaran Pemerintah secara terlembaga	Tersusunnya draft ketentuan menyangkut mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dan anggaran	Diterbitkannya ketentuan yang mengatur mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program dan anggaran
		Pengaturan mekanisme publik menyampaikan keluhan dan pengaduan dalam proses perencanaan program dan anggaran Pemerintah	Tersusunnya draft mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan dalam perencanaan program dan anggaran	Tersusunnya mekanisme penyampaian keluhan dan pengaduan dalam perencanaan program dan anggaran
		Terlaksananya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dan anggaran secara terlembaga	Tersusunnya strategi dan rencana kerja pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dan anggaran.	Laporan pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program dan anggaran.
		Transparansi draft RKP sebelum pelaksanaan Musrenbang dan pertemuan multi-stakeholder forum	Tersusunnya strategi dan rencana kerja termasuk disain publikasi draft RKP sebelum pelaksanaan Musrenbang dan hasil pertemuan multi-stakeholder forum dalam Website Bappenas	Publikasi draft RKP sebelum pelaksanaan Musrenbang dan hasil pertemuan multi-stakeholder forum dalam Website Bappenas
		Pengaturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan pemerintah.	Tersusunnya draft awal mekanisme Participatory Regulatory Impact Assessment (PRIA) dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Pemerintah.	Diterbitkannya mekanisme Participatory Regulatory Impact Assessment (PRIA) dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Pemerintah.

**DAFTAR RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2012
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	
			Bulan Juni 2012	Bulan Desember 2012
1.	Mendorong Transparansi Layanan Publik di Kantor Bea dan Cukai	Transparansi profil organisasi dan SDM, layanan publik Kantor Bea & Cukai pusat dan daerah (jenis, mekanisme biaya dan waktu), dan laporan kinerjanya melalui website Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai dan media lainnya di Seluruh Kantor Bea Cukai.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja penyempurnaan publikasi data dalam website dan media lainnya di Kantor Bea dan Cukai	Publikasi data dalam website dan media lainnya di Kantor Bea dan Cukai, meliputi : (a). Profil Organisasi & SDM : struktur org. dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan nomor contactnya, alamat jelas kantor, (b). Layanan Publik, meliputi : pengurusan dokumen keluar masuk barang (ekspor dan impor), prosedur jelas, biaya pengurusan, waktu dibutuhkan, pihak untuk dihubungi dalam hal ada keluhan di prosedur kepabeanan (pre dan custom clearance)
	Mendorong Transparansi di Pengadilan Pajak	Transparansi data mekanisme layanan publik, info status sengketa pajak dan putusan pengadilan pajak melalui website dan media lainnya.	Tersusunnya strategi dan rencana kerja terobosan publikasi data di website Pengadilan Pajak	Publikasi data dalam website dan media lainnya meliputi informasi : (i) Re-grouping content website, (ii) Penambahan fitur info RUS (Rencana Umum Sidang), (iii) pemanfaatan SMS untuk cek status perkara
	Melembagakan pelaksanaan mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan dan pengelolaan program dan anggaran	Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran.	Tersusunnya draft awal ketentuan menyangkut mekanisme partisipasi masyarakat dalam terlibat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran Negara	Diterbitkannya ketentuan menyangkut mekanisme partisipasi masyarakat dalam terlibat dalam penyusunan dan penggunaan anggaran Negara
2.	Membuka akses publik terhadap informasi anggaran	Transparansi data PNBPN dan utang luar negeri di web nasional dan media lainnya	Tersusunnya strategi dan rencana kerja untuk publikasi data PNBPN dan utang luar Negeri.	Dipublikasinya data PNBPN dan utang luar negeri di web Kementerian Keuangan
		Pemda Prov./Kabupaten/Kota mempublikasikan APBD dan laporan realisasi APBD secara bulanan pada website Kemenkeu dan atau website pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi dan rencana kerja untuk publikasi APBD dan laporan realisasi APBD secara bulanan pada website Kemenkeu	Publikasikan APBD dan laporan realisasi APBD Provinsi dan Kab/Kota secara bulanan pada website Kemenkeu